

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Ikhwanul Muslimin adalah organisasi Islam tertua dan terbesar di Mesir, didirikan oleh Hassan al-Banna pada 1928. Gerakan ini awalnya dimaksudkan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, tetapi kemudian tumbuh menjadi gerakan politik. Di Mesir terutama, gerakan ini berjuang melawan koloni Inggris dan memberantas semua pengaruh dari Barat. Mereka mampu menyebar ke seluruh dunia lewat aktivitas politik yang dipadukan dengan kegiatan amal<sup>1</sup>. Kemunculan Ikhwanul Muslimin (IM) terdukung oleh kharisma pendirinya, al-Banna yang mampu merekrut sejumlah kaum terpelajar dan buruh untuk bergabung dalam Ikhwanul Muslimin. Al-Banna berhasil menggalang pengikut dalam jumlah besar yang terbagi menjadi sejumlah kelompok yang mengorganisir masjid, sekolah, klinik bahkan menjalin kerjasama antar anggotanya.

Dalam upaya menanamkan doktrin ideologi di dalam organisasi, Hasan al-Banna menyerukan Islam yang total dan aktif serta menganggap negara Islam sebagai unsur penting dari tatanan Islami yang diinginkan. Pada periode awal kemunculannya, Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi sosial, dan tidak mengklaim sebagai sebuah partai politik atau gerakan politik lainnya, meskipun

---

<sup>1</sup> Sejarah Ikhwanul Muslimin Hingga Disebut Kelompok Teroris , Heru Andriyanto  
<https://www.beritasatu.com/dunia/551720/sejarah-ikhwanul-muslimin-hingga-disebut-kelompok-teroris> diakses pada 29 juni 2019

sebagai sebuah kekuatan politik mereka patut diperhitungkan<sup>2</sup>. Pada tahun 1938, Ikhwanul Muslimin menerbitkan publikasi yang bernama al-Nadzir yang terkadang mengeluarkan ancaman akan melawan politisi atau organisasi mana pun yang tidak memberi dukungan terhadap Islam dan pemulihan kejayaannya. Pada masa itu Ikhwanul Muslimin mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, tercatat pada tahun tersebut gerakan ini sudah memiliki 300-an cabang, tahun 1940 terbentuk 500 cabang, dan pada tahun 1949 telah ada 2.000 cabang dengan jumlah anggota 500 ribu orang.

Ikhwanul Muslimin juga membentuk berbagai organ seperti, “aparat rahasia, “satuan tugas”, mendirikan perusahaan, pabrik, sekolah, dan rumah sakit sendiri, serta menyusup ke berbagai organisasi seperti serikat buruh dan militer. Selain itu Ikhwanul Muslimin juga bekerjasama dengan gerakan pemuda yang anti pemerintahan Inggris, dan rezim korup Mesir. Akibatnya, pada akhir 1940-an Ikhwanul Muslimin sudah hampir menjadi “negara di dalam negara<sup>3</sup>.”

Di sejumlah negara, IM dipandang sebagai lawan politik oleh rezim yang berkuasa. Salah satunya di Suriah, pada Juli 1980, rezim Hafiz al-Asad mengeluarkan dekrit bahwa “Setiap orang yang berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin dapat dijatuhi hukuman mati.” Sebelumnya, Juni 1979, IM dituduh terlibat dalam pembunuhan terhadap 80 calon perwira militer Suriah, serta upaya pembunuhan terhadap Asad pada akhir 1980. Pada Februari 1982, terjadi

---

<sup>2</sup> Sejarah Perkembangan Ikhwanul Muslimin Abad XX, Rifai Shodiq Fathoni  
<https://wawasansejarah.com/sejarah-ikhwanul-muslimin-abad-xx/> diakses pada 29 juni 2019

<sup>3</sup> Ibid

pembantaian yang dilakukan rezim Asad terhadap 20 ribu jiwa simpatisan IM Suriah. Di negara-negara lain IM tidak hanya terlibat dalam bentuk oposisi politik, tetapi mereka aktif dalam proses politik di sejumlah negara seperti Mesir, Sudan, Yordania, dan Kuwait. Keikutsertaan IM terwujud dalam bentuk berdiri sendiri maupun berkoalisi dengan kekuatan politik lain.

Pra Arab Spring merupakan masa pencapaian pengaruh IM yang hampir tidak terbayangkan. Hal ini terlihat ketika kemenangan gemilang berhasil diraih IM pada pemilihan parlemen bulan November 2011 sampai Januari 2012, dan lima bulan kemudian, 30 Juni 2012, Muhammad Mursi, seorang tokoh senior IM, menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis di Mesir<sup>4</sup>.

Puncak dari ketegangan antara IM dan Pemerintah Mesir saat ini adalah ketika setelah kudeta 3 Juli 2013, IM dinyatakan sebagai organisasi terlarang di negara Mesir oleh pemerintahan Al-Sisi<sup>5</sup>. Di Yordania, IM telah menikmati banyak kesuksesan dalam usaha pengorganisasiannya, tetapi juga menghadapi tantangan yang kuat dari rezim yang berkuasa. Pemerintah Yordania membiarkan IM bertindak secara terbuka, mengikuti pemilihan umum dan bahkan memenangkan banyak kursi parlemen, meskipun hasil akhir tetap akan memenangkan pemerintahan pro-rezim. Sementara dalam kasus Suriah, IM adalah organisasi bawah tanah yang tidak memiliki ruang untuk bertindak di hadapan publik sama sekali. Begitupun dengan di Eropa, impian besar IM untuk

---

<sup>4</sup> Carrie Rosefsky Wickham, *The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement*(New Jersey: Princeton University Press, 2013), 46.

<sup>5</sup> Shaimaa Magued, "The Egyptian Muslim Brotherhood's transnational advocacy in Turkey: a new means of political participation," *British Journal of Middle Eastern Studies*(2017)

menciptakan masyarakat baru melalui pembentukan negara Islam tidak mungkin direalisasikan. Lelahnya retorika Islam dan runtuhnya dorongan utopia dalam Islam telah menyebabkan para pemimpin organisasi ini memperbarui posisi ideologis organisasi tersebut. Jadi, dari tahun 1989 citra Islamisme berubah dengan realisasi ketidakmungkinan kembali kemenangan ke negara asal. Marginalisasi retorika Islam ditekankan oleh mutasi hebat yang dialami Islam di Prancis dan Belgia pada periode ini. Islam dianggap bukan lagi agama imigran yang bertekad untuk kembali ke negara asal mereka, namun telah menjadi agama yang taat, pada saat generasi baru Muslim, yang lahir dan dididik serta kemudian muncul dan mencari Islam di Eropa. Oleh karenanya, IM dapat dipahami sebagai struktur yang berusaha menjadi wakil dan pembela umat Islam di Eropa<sup>6</sup>..

Sama seperti negara mesir, negara Arab Saudi juga mengalami pasang surut hubungan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin ini, pada waktu kerajaan Arab Saudi dipimpin oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz para simpatisan Ikhwanul Muslimin dimesir yang pada waktu itu diburu oleh pemerintahan mencari usaka di Arab Saudi dan kerajaan menerima para pencari suaka dan menganggap bahwa mereka orang-orang para pendidik, birokrat, dan insinyur berkualitas yang dibutuhkan kerajaan.

Raja Faisal bin Abdulaziz, yang memimpin dari 1964 hingga 1975, juga menemukan di dalam mereka suara yang dia butuhkan untuk mengimbangi penyebaran Pan-Arabisme dan bahaya komunisme di wilayah itu yang

---

<sup>6</sup> Samir Amghar, Europe puts, 72

mengancam posisi Arab Saudi sebagai pusatnya. Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin menemukan Gamal Nasser sebagai musuh bersama. Hal itu berlangsung hingga masa pemerintahan Anwar Sadar, penerus Nasser, di mana Ikhwanul Muslimin diperkenalkan kembali ke arena politik, meskipun bukan sebagai sebuah partai resmi<sup>7</sup>.

Invasi Soviet pada Afghanistan di tahun 1979 merupakan perkembangan lain yang memperkuat hubungan keduanya (Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin). Bersama Amerika Serikat, Arab Saudi secara rahasia menyalurkan miliaran dolar pada kelompok mujahidin Afghanistan yang memerangi Uni Soviet. Melalui pengumpulan donasi dan upaya-upaya mobilisasi, Ikhwanul Muslimin dikatakan telah menjadi bagian integral dalam pendirian yang disebut sebagai “orang Arab Afghanistan“, yang nantinya ada kelompok al-Qaeda (al-Qaidah).

Tak lama kemudian terjadilah Arab Spring (Musim Semu Arab). Di saat dunia menyaksikan keruntuhan empat kediktatoran Arab (di Tunisia, Mesir, Libya dan Yaman). Bahkan satu tahun setelah pengulingan presiden mursi, Arab Saudi menunjuk Ikhwanul Muslim sebagai “organisasi teroris”. Raja Abdullah bin Abdulaziz Al Saud mengumumkan hukuman penjara 20 tahun bagi siapapun yang didakwa anggota dari “kelompok teroris” dan ikut bertempur di luar negeri.

Selain juga mengkategorikan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris, banyak hal-hal lainnya yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Seperti yang

---

<sup>7</sup>Saudi dan Ikhwanul Muslimin: Dulu Berteman, Mengapa Dimusuhi?, Nashirul Haq AR <https://www.hidayatullah.com/kolom/analisa-dunia-islam/read/2017/07/26/120432/saudi-dan-ikhwanul-muslimin-dulu-teman-mengapa-dimusuhi.html> diakses pada 30 juni 2019

dikatakan oleh Menteri Urusan Islam Arab Saudi Syeikh Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Sheikh menyatakan bahwa Ikhwanul Muslimin (IM) merupakan salah satu kelompok “terkeji dan paling berbahaya” di tengah umat Islam<sup>8</sup>, Selain itu Pemerintah Saudi juga akan memberhentikan para staf pendidikan yang bersimpati terhadap organisasi yang dilarang di kerajaan tersebut dan juga Pemerintah akan memerangi ideologi ekstremis dengan mengevaluasi kurikulum dan buku-buku sekolah untuk memastikan semuanya bersih dari agenda Ikhwanul Muslimin<sup>9</sup>. Bahkan Arab Saudi juga akan mengeksekusi para petinggi-petinggi Ikhwanul Muslimin yang berada negaranya, ketiga petinggi itu adalah antara lain Wad al-Qarni, Ali al-Omari, dan Salman al-Odah<sup>10</sup>.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas antara hubungan Ikhwanul Muslimin dengan Arab Saudi yang pada awalnya mempunyai hubungan yang baik namun pada akhir terjadi permusuhan tersebut, maka dari itu peneliti ingin menjawab faktor apa yang mempengaruhi penolakan gerakan Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi?

---

<sup>8</sup> Arab Saudi Sebut Ikhwanul Muslimin Kelompok Terkeji Di Tengah Umat Islam, Muhammad <http://liputanislam.com/internasional/timur-tengah/arab-saudi-sebut-ikhwanul-muslimin-kelompok-terkeji-di-tengah-umat-islam/> diakses pada 5 juli 2019

<sup>9</sup> Arab Saudi Bersihkan Kurikulum Sekolah dari Pengaruh Ikhwanul Muslimin, Erwan Hardoko <https://internasional.kompas.com/read/2018/03/21/20574681/arab-saudi-bersihkan-kurikulum-sekolah-dari-pengaruh-ikhwanul-muslimin> diakses pada 5 juli 2019

<sup>10</sup> Tiga Ulama yang Disebut Akan Dieksekusi Saudi Bakda Ramadhan, Muhaimin <https://international.sindonews.com/read/1406650/43/tiga-ulama-yang-disebut-akan-dieksekusi-saudi-bakda-ramadhan-1558580802> diakses pada 5 juli 2019

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang membuat negara Arab Saudi yang pada akhirnya menolak gerakan Ikhwanul Muslimin ini dinegaranya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis berharap agar memberikan manfaat secara teoritis dan juga praktis. Manfaat teoritis untuk memahami fenomena gerakan IM dalam kawasan timur tengah dan juga untuk mengetahui atas faktor apa IM dianggap sebagai gerakan terlarang oleh Arab Saudi yang notabennya sama dengan IM dalam membangun negara berdasarkan Agama. Manfaat praktis, sebagai syarat untuk memenuhi gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

#### **1.5.1 *Level of Analysis***

Peringkat analisis atau level of analysis adalah metode melakukan analisis dalam penelitian Hubungan Internasional. Menurut Waltz, level of analysis merupakan faktor-faktor penjelas, sementara bagi Singer, terdapat 4 peringkat analisis target, yaitu untuk membantu peneliti memperoleh gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*), dan perkiraan (*prediction*) yang akurat mengenai perilaku aktor-aktor dalam Hubungan Internasional<sup>11</sup>. Mochtar Mas'ood

---

<sup>11</sup> Kenneth Waltz, The State and War dalam Yessi Olivia. Level Analisis Sistem dan Teori

menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga keuntungan menggunakan *level of analysis*, yaitu: (1) untuk menganalisis fenomena yang disebabkan oleh lebih dari satu faktor; (2) membantu peneliti dalam menentukan faktor penyebab yang lebih dominan; (3) mengurangi kesalahan dalam berasumsi<sup>12</sup>.

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, terdapat tiga jenis *level of analysis* yaitu individu (*individual level*), negara atau masyarakat (*state level*), dan sistem internasional (*system level*). Pada tingkat individu, analisis berfokus pada individu manusia yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Pada tingkat negara, analisis berfokus pada konteks struktur politik yaitu negara, yang biasanya berkaitan dengan kepentingan nasional. Sedangkan pada tingkat sistem internasional analisis berfokus pada perilaku negara dengan melihat sistem internasional. Karakteristik sistem internasional tersebut yang akan menentukan perilaku negara-negara<sup>13</sup>.

Unit analisis dimaknai sebagai objek yang perilakunya hendak diteliti (disebut juga “variabel dependen”). unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang digunakan. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah negara Arab Saudi sedangkan unit eksplanasinya adalah penolakan gerakan Ikwatul Muslimin.

---

Hubungan Internasional Jurnal Transnasional, Vol. 5 No. 1. Riau: Hubungan Internasional FISIP Universitas) hlm. 2.

<sup>12</sup> Mochtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1994.

<sup>13</sup> John T. Rourke, International Politics on the World Stage, McGraw-Hill, New York, 2009.



## 1.5.2 Landasan Teori

### 1.5.2.1 *Transnational threats*

Menurut James Rosanau mendefinisikan transnasional sebagai proses dimana hubungan internasional yang dilaksanakan pemerintah telah di sertai oleh hubungan individu, kelompok dan masyarakat swasta yang dapat memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi peristiwa<sup>14</sup>. Namun dengan adanya perkembangan transnasional ini bukan hanya dalam hal-hal hubungan dan komunikasi saja namun juga ancaman transnasional.

Ancaman tentunya menjadi suatu permasalahan yang dapat meresahkan masyarakat suatu negara. Dari dulu hingga saat ini, ada banyak sekali peristiwa yang merupakan ancaman bagi keselamatan masyarakat di berbagai negara<sup>15</sup>. Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa seperti contoh agresi, invasi, dan pemberontakan. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi,

---

<sup>14</sup> J.N. Roscnau, "The study of global interdependence: Essay on the transnationalisme of wordaffairs". 1980, New York: Nicholas dalam Jackson, R., & Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, p.1

<sup>15</sup> Priyo Danu Pasopati, Apa yang dimaksud dengan ancaman negara?, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-ancaman-negara/9161> diakses pada 29 september 2019.

sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum, seperti contoh ancaman Ideologi yaitu pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan pemikiran suatu negara seperti contoh Gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatarbelakangi gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnis, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini masih terdapat radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain dalam negara yang sudah mempunyai dasar negaranya sendiri maka tersebut bisa dikatakan sebagai ancaman ideologi<sup>16</sup>.

Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain<sup>17</sup>. Seperti contoh Ancaman separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan instrumen militer.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Gatot Anwar Nasution, Apa yang dimaksud dengan ancaman negara?, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-ancaman-negara/9161>, diakses pada 29 september 2019

### 1.5.2.2 Persepsi Ancaman

Persepsi ancaman jika dipandang dari sudut pandang konstruktivisme merupakan realitas yang dibentuk terlebih dahulu dalam benak pembuat kebijakan yang adalah manusia. Alexander Wendt menyatakan bahwa keputusan suatu negara merupakan konstruksi yang dibangun sendiri menurut kerangka pemikiran negara tersebut<sup>18</sup>.

Persepsi ancaman merupakan pandangan politik suatu negara. Dalam pendapat John E. Mroz, persepsi adalah pemahaman dan kesadaran diri terhadap peristiwa, situasi atau proses. Pemahaman dan kesadaran diri ini pada dasarnya akan mempengaruhi sikap pada sesuatu hal. Persepsi yang terbentuk kemudian adalah persepsi ancaman dan persepsi historis. Persepsi ancaman, menurut Mroz, adalah pemahaman bahwa apapun yang dilakukan pihak musuh selalu menjadi ancaman baginya<sup>19</sup>.

Persepsi menurut Yahya Muhaimin adalah proses seseorang menjadi tahu akan beberapa hal melalui panca inderanya dan menafsirkan apa arti kesan yang diketahui tersebut. Muhaimin berpendapat, persepsi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor ideologi, kepribadian dan pengalaman masa lalu<sup>20</sup>. Fukuyama sendiri mengungkapkan bahwa persepsi ancaman adalah ketika sebuah negara meningkatkan kapasitas militer yang dimilikinya dan membuat negara lain merasa terancam sehingga meningkatkan kapasitas militer yang dimilikinya sebagai

---

<sup>18</sup> Wendt, Alexander, 1992. "Anarchy is What State Make of It", *International Organization*, 46

<sup>19</sup> Mroz, John E, 1980. *Beyond Security: Private perceptions Among Arabs and Israelis*. New York: Pergamon Press

<sup>20</sup> Yahya Muhaimin, 1985. *Kamus Istilah Politik*. Jakarta: Depdikbud.

tindak defensif untuk menyaingi negara tersebut. Negara yang satu akan menganggap tindakan defensif tersebut sebagai ancaman dan begitu seterusnya<sup>21</sup>.

Persepsi ancaman bertindak sebagai antisipasi dari pihak pengamat atau pembuat keputusan, dari bahaya yang akan datang – biasanya dari jenis militer, strategis, atau ekonomi. Latar belakang munculnya persepsi ancaman dapat dilihat melalui beberapa faktor, seperti: 1) Hubungan sebelumnya antara penerima ancaman dan sumber ancaman, termasuk sejarah maupun peristiwa yang baru terjadi; 2) Pengalaman ancaman sebelumnya dari pihak yang mempersepsikan, dan karakteristik pribadi lainnya yang mempengaruhi subjek, termasuk faktor psikologis seperti kecemasan dan ketidakpercayaan yang berlebihan, sikap pribadi, dan keyakinan filosofis; 3) Keseimbangan kemampuan antara aktor yang relevan (kemampuan diplomatik, militer dan sarana ekonomi, dan bantuan sekutu); 4) Faktor struktural (pengaruh bentuk dan prosedur birokrasi, kepentingan institusional, dan perencanaan kontingensi); 5) Kerangka hukum (perjanjian, hukum internasional, dan norma-norma perilaku) di mana hubungan dilakukan; 6) Kebijakan dan kepentingan penerima ancaman di area atau masalah yang dipertanyakan<sup>22</sup>.

Persepsi ancaman juga dipengaruhi oleh kesamaan nilai antara masyarakat lokal terhadap kelompok masyarakat luar. Semakin besar persamaan nilai, maka semakin besar pula munculnya persepsi ancaman. Sebaliknya, apabila tidak ada

---

<sup>21</sup> Francis Fukuyama, 1992. *The End of History and The Last Man*. Penguin Books.

<sup>22</sup> Raymond Cohen. 1979. *Threat Perception in International Crisis*. Madison: University of Wisconsin Press.

nilai bersama, kemungkinan persepsi ancaman berdasarkan posisi relatif lebih lemah tumbuh<sup>23</sup>. Pada akhirnya, persepsi ancaman meningkatkan kebutuhan negara akan keamanan dan keselamatan.

### **1.5.2.3 Sekuritisasi**

Sekuritisasi menurut Buzan, Waever dan Jaap de Wilde adalah sebuah bentuk ekstrem dari upaya politik. Setiap isu publik dapat dikategorikan dalam tiga jangkauan yang antara lain, nonpolitik yang berarti pemerintah tidak menanggapi permasalahan ini karena tidak termasuk dalam isu yang menyangkut kepentingan dan perdebatan dalam ranah publik. Politik, yang berarti bahwa isu tersebut telah masuk pada ranah kebijakan publik yang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal alokasi sumber daya, atau kebijakan tambahan. Selanjutnya, to securitized, yang berarti bahwa sebuah isu telah dianggap sebagai ancaman keamanan yang bersifat nyata, yang tentu saja membutuhkan tindakan yang darurat dimana penggunaan prosedur diatas prosedur politik biasa dianggap sah untuk dilakukan<sup>24</sup>.

Untuk membatasi suatu isu menjadi masalah keamanan, sekuritisasi yang berhasil terdiri dari tiga langkah, yaitu: 1) identifikasi ancaman eksistensial; 2) tindakan darurat; 3) efek pada hubungan antar-unit dengan melanggar aturan. Langkah pertama menuju sekuritisasi melibatkan negosiasi aktor sekuritisasi dan audiens dalam mencapai persetujuan kolektif terhadap sifat ancaman dan

---

<sup>23</sup> Rocio Garcia-Retamero, Stephanie M. Müller, and David L. Rousseau. 2012. "The impact of value similarity and power on the perception of threat", dalam *Political Psychology* 33(2).

<sup>24</sup> Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, *Security: A New Framework of Analysis*, (London : Lynne Rienner Publisher, 1998) hal. 23

dukungan dalam mengambil tindakan di luar batas atau melanggar aturan. Apabila audiens tidak sepekat dengan aktor sekuritisasi, maka suatu isu tidak dapat dikatakan mengalami sekuritisasi. Dalam proses sekuritisasi, *speech act* menjadi elemen penting, di mana adanya tindakan aktor untuk melabeli sebuah isu menjadi isu keamanan dan kemudian dapat diterima oleh audiens. Namun dalam kasus yang ekstrem, aktor sekuritisasi tidak melakukan negosiasi dengan pihak lain. aktor sekuritisasi akan mengambil tindakan dengan melanggar aturan. Pelanggaran terhadap aturan sendiri merupakan tindakan keamanan dan dimotivasi oleh ketakutan bahwa pihak lain tidak akan membiarkan mereka bertahan hidup<sup>25</sup>.

Dalam buku *On Security*, Ole Waever menyatakan bahwa: *security* sebagai “*speech act*”. Dengan mengartikulasikan keamanan, pemerintah bergerak dari fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian masuk dalam area yang sifatnya spesifik kemudian mengambil langkah-langkah apapun sebagai bagian dari hak istimewanya untuk dapat menghentikannya<sup>26</sup>. Dan juga dalam *Security: A New Framework of Analysis*, Buzan, Waever dan Jaap de Wilde mengemukakan: Keamanan adalah langkah yang dilakukan dengan melampaui aturan main secara umum dalam membingkai suatu isu apakah isu tersebut termasuk dalam ranah politik atau melampauinya<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, *Security: A New Framework of Analysis*, (London : Lynne Rienner Publisher, 1998)

<sup>26</sup> Ole Waever, *Securitization and Desecuritization*, dalam Ronnie D. Lipschutz (ed) *On Security*, (New York: Columbia University Press, 1995) hal. 55.

<sup>27</sup> Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, *Security: A New Framework of Analysis*, (London : Lynne Rienner Publisher, 1998) hal. 23

Selanjutnya teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan, Waever dan Jaap de Wilde, oleh Mely Caballero, Anthony & Ralf Emmers serta Amitav Acharya di kombinasikannya melalui beberapa langkah yang bertujuan untuk mengaplikasikan serta mengoperasionalisasikan teori sekuritisasi ini melalui kerangka kerja yang terdiri dari<sup>28</sup>: *Issue Area*: melihat apakah terdapat consensus bersama antar para aktor dalam menentukan existential threat; *Securitizing Actors*: menentukan siapakah aktor yang melakukan sekuritisasi serta bertindak atas dasar kepentingan siapa?; *Security Concept (whose security)*: konsep keamanan yang digunakan oleh aktor dalam melakukan tindakan sekuritisasi. Misal: negara melakukan sekuritisasi berlandaskan keamanan nasional, NGO (*Nongovernmental Organizations*) melakukan sekuritisasi dengan berlandaskan *human security*; *Process*: penggunaan speech acts berdampak terhadap sebuah proses sekuritisasi; *Degree of Securitization*: melihat sejauhmana sekuritisasi telah dilakukan dengan menggunakan beberapa indicator, antara lain *resource allocation trends, military involvement, legislation, and institutionalization*; *Impact on the Threat*: melihat sejauh mana upaya sekuritisasi berdampak terhadap *existensial threat*; *Condition Affecting Securitization*: proses sekuritisasi akan berdampak sekaligus mempengaruhi faktor-faktor lain; *Interplay of different concept of security, Linkage between security issues, Role of powerful actors, Domestic political system, International norms.*

---

<sup>28</sup> Mely Caballero, Anthony & Ralf Emmers, Amitav Acharya (ed) *Non Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization*, (ASGATE. 2006), hal. 6-8

Seperti konstruktivisme, sekuritisasi bergelut dengan masalah mengenai identitas kolektif. Jadi, dalam sekuritisasi, tidak hanya membahas aktor tradisional dalam HI yaitu negara, melainkan turut memasukkan masyarakat.

Di dalam sekuritisasi, isu keamanan merupakan hasil konstruksi. Sekuritisasi berfokus pada keamanan masyarakat, yaitu keamanan untuk sekelompok masyarakat yang terdapat di dalam suatu negara yang berdaulat. Sekuritisasi memiliki fokus mengenai bagaimana ide mengenai keamanan dipahami dan bagaimana hal itu "dipolitisasi" atau ditetapkan dengan kerangka "objektif" yang spesifik. Dengan demikian merupakan seperangkat ide dan praktek yang mengidentifikasi individu sebagai anggota dari kelompok sosial masyarakat merupakan identitas, mengenai konsepsi diri dari masyarakat dan individu mengidentifikasikan diri mereka sebagai suatu kelompok masyarakat.

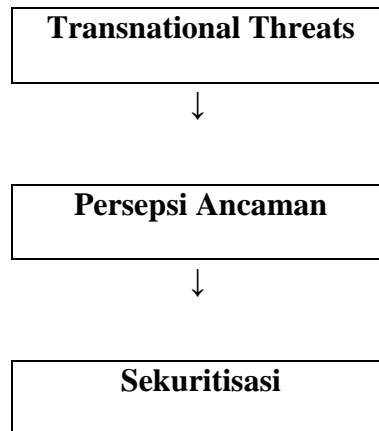
Buzan mengkategorikan lingkup isu keamanan ke dalam 5 sektor, yang tiap sektornya mengidentifikasi dari interaksi yang ada. Adapun isu yang dimasukkan Buzan seperti<sup>29</sup>: Sektor militer (*forceful coercion*); Sektor politik (otoritas, status pemerintah, dan pengakuan); Sektor ekonomi (perdagangan, produksi, dan finansial); Sektor sosial (*collective identity*); Sektor lingkungan (aktifitas manusia dan lingkungan hidup).

---

<sup>29</sup> Barry Buzan, Ole Waver, & Jaap de Wilde, (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder Colo: Lynne Rienner, hal. 7-8.



### 1.5.3 Sintesa Pemikiran



Sintesa pemikiran ini dimulai dengan menggunakan ancaman transnasional yang digunakan untuk menjelaskan ancaman yang terjadi jika gerakan Ikhwanul Muslimin masuk ke negara Arab Saudi. Kemudian ancaman transnasional tersebut dipersepsikan sebagai ancaman bagi Arab Saudi, maka dengan adanya ancaman tersebut dilakukan tindakan-tindakan sebagai langkah keamanan terhadap ancaman tersebut maka dilakukan sekuritisasi.

### 1.6 Hipotesis.

Pergerakan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah membuat resah sejumlah negara terutama Arab Saudi. Arab Saudi merasa akan adanya ancaman transnasional terhadap Ikhwanul Muslimin, seperti ancaman politik dan ideologi. Maka dari itu ancaman-ancaman tersebut dipersepsikan Arab Saudi sebagai ancaman keamanan. dan dalam masalah sosial, identitas kolektif yang di bawa oleh Ikhwanul Muslimin dianggap dapat mengganggu tatanan sosial yang ada di negara Arab Saudi, maka dari itu dilakukannya tindakan sekuritisasi terhadap Ikhwanul Muslimin oleh Arab Saudi.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Definisi Konsep dan Operasional**

#### **1.7.1.1 Ancaman Politik**

Politik merupakan salah satu sarana interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga apapun program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat dimana tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan baik<sup>30</sup>. politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Dengan demikian aturan-aturan dan keputusan yang tadi ditetapkan serta dilaksanakan oleh pemerintah ditengah keadaan sosial yang dipengaruhi oleh kemajemukan, perbedaan kontroversi, ketegangan dan konflik oleh karena itu perlunya di tegakkan tata tertib sehingga dapat diharapkan dengan penegakan tata tertib tersebut tidak akan terjadi perpecahan antar masyarakat<sup>31</sup>

Ancaman tentunya menjadi suatu permasalahan yang dapat meresahkan masyarakat suatu negara. Dari dulu hingga saat ini, ada banyak sekali peristiwa yang merupakan ancaman bagi keselamatan masyarakat di berbagai negara. Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter.

Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dilakukan oleh suatu

---

<sup>30</sup> Surbakti Ramlan,(1999), Memahami ilmu politik, Gramedia Widia sarana Indonesia, Jakarta

<sup>31</sup> Kartono Kartini, (1996) Pendidikan Politik, Mandiri Maju, Bandung

negara dengan melakukan tekanan politik. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Seperti contoh Ancaman separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan instrumen militer. Sebaliknya, ancaman separatisme dengan bersenjata tidak jarang mengalami kesulitan sebagai akibat dari politisasi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan pendekatan operasi militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman berdimensi politik memiliki tingkat risiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa<sup>32</sup>.

Seperti halnya Arab Saudi yang menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin dapat mengancam perpolitikan yang ada dinegaranya dan Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai gerakan yang membahayakan bagi negara Arab Saudi.

### **1.7.1.2 Ancaman Ideologi**

Ideologi bentuk dari reproduksi sosial dan juga sebagai alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. akan tetapi karl marx memberikan arti yang lebih jauh lagi, bahwa ideologi dapat diciptakan oleh kelas masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memproduksi atau

---

<sup>32</sup> Priyo Danu Pasopati, Apa yang dimaksud dengan ancaman negara?, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-ancaman-negara/9161> diakses pada 29 september 2019.

mengendalikan bahan baku masyarakat<sup>33</sup>. Harold H. Titus, mendefinisikan ideologi adalah sebagai suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita. mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi serta filsafat sosia serta filsafat sosial yang dilaksanakan bagi suatu rencana sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat<sup>34</sup>.

Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri dan dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara beserta keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Sehingga ancaman lebih dikaitkan pada bagian dari risiko, sedangkan risiko merupakan buah pikir dari sebuah ancaman. Ancaman tentunya menjadi suatu permasalahan yang dapat meresahkan masyarakat suatu negara. Dari dulu hingga saat ini, ada banyak sekali peristiwa yang merupakan ancaman bagi keselamatan masyarakat di berbagai negara<sup>35</sup>

Ancaman ideologi dikategorikan sebagai ancaman nirmiliter, Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan

---

<sup>33</sup> Yaya Mulya Mantri, Makna Ideologi dari Berbagai Sudut Pandang Para Ahli dan Aplikasinya di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/ymulya/5519b8c8813311997a9de0c1/makna-ideologi-dari-berbagai-sudut-pandang-para-ahli-dan-aplikasinya-di-indonesia> diakses pada 27 november 2019

<sup>34</sup> Pengertian Ideologi Menurut para Ahli, <https://pengertianahli.id/2013/05/pengertian-ideologi-menurut-para-ahli.html> diakses pada 27 November 2019

<sup>35</sup> Pengertian Ancaman: Arti, Jenis-Jenis, dan Contoh Ancaman, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-ancaman.html> diakses pada 27 November 2019

informasi, serta keselamatan umum, seperti contoh ancaman Ideologi yaitu pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan pemikiran suatu negara seperti contoh Gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatarbelakangi gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnis, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini masih terdapat radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain dalam negara yang sudah mempunyai dasar negaranya sendiri maka tersebut bisa dikatakan sebagai ancaman ideologi.

Dan dalam konteks penelitian ini Arab Saudi yang merasa bahwa ideologi yang dibawa oleh organisasi Ikhwanul Muslimin ini dapat membahayakan ideologi Arab Saudi ini, walaupun pada dasarnya menganut ideologi yang hampir sama yaitu berlandaskan Islam.

### **1.7.1.3 Identitas Kolektif**

Pada dasarnya, Negara merupakan jenis entitas yang tidak bisa lepas dari atribut identitas dan kepentingan. Dalam pemahaman filosofis, identitas adalah apa pun yang menjadikan sesuatu itu menjadi sesuatu sebagaimana adanya. Hal ini berarti bahwa identitas berada pada tingkat unit atau ciri subjektif dari unit tersebut, yang artinya identitas berakar pada pemahaman diri seorang aktor. Namun, makna dari pemahaman tersebut akan sangat bergantung pada apakah aktor lain memahami aktor tersebut dengan cara yang sama, sehingga pada tahapan ini identitas bersifat intersubjektif atau sistemik. Misalnya, John mungkin berpikir dia adalah seorang profesor, tetapi jika keyakinan itu tidak dibagi kedalam pemahaman mahasiswanya maka identitasnya tidak akan bekerja dalam

interaksi mereka. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa identitas dibentuk oleh dua ide, yaitu, yang dipegang oleh Diri (*Self*) dan yang dimiliki oleh Yang Lain (*Other*). Dengan kata lain, bahwa Identitas didasari oleh struktur internal dan eksternal<sup>36</sup>.

Konstruktivisme adalah cara pandang yang memusatkan perhatian pada kesadaran manusia serta peranannya dalam hubungan internasional. Asumsi dasar konstruktivisme adalah bahwa dimensi gagasan lebih penting ketimbang dimensi material, dan bahwa identitas dan kepentingan ditentukan oleh gagasan tersebut ketimbang seperti apa adanya<sup>37</sup>. Alasan kenapa dimensi gagasan yang tidak tampak ini sangat penting karena “Sumberdaya material hanya bermakna bagi tindakan manusia sejauh melalui struktur pemahaman bersama dimana mereka berada”. Dengan demikian, logika berpikir konstruktivis sangat berbeda dengan realis. Jika realis menekankan pada dimensi material berupa distribusi kapabilitas antar negara, konstruktivis menekankan pada dimensi tidak tampak berupa distribusi pengetahuan atau intersubyektivitas (*shared understanding*) antar negara<sup>38</sup>.

Salah satu konsep kunci konstruktivis untuk memahami fenomena hubungan internasional adalah identitas. Konsep identitas sebenarnya dipinjam dari sosiologi dan psikologi sosial. Berdasarkan kedua disiplin itu, identitas bisa dipahami melalui dua pemaknaan. Pertama, identitas sebagai kategori ‘sosial’

---

<sup>36</sup> Wendt, A. (2003). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>37</sup> Ruggie, John. 1998. “What Makes the World Hang Together? Neo-utilitarianism and the Social Constructivist Challenge”, *International Organization*, Vol. 52, No. 4 (Autumn), pp. 855-885.

<sup>38</sup> Wendt, A. (2003). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

yaitu atribut atau karakteristik yang membedakannya dengan yang lain. Konsepsi ini mengimplikasikan identitas sebagai sesuatu yang terkonstruksi dalam proses interaksi dengan pihak lain (significant other). Jadi dibutuhkan intersubektivitas untuk memberi makna siapa 'aku/kami' dan siapa 'kamu/mereka'. Bagaimana kelompok atau individu-individu di luar aktor berpengaruh terhadap bagaimana cara aktor memandang dirinya dan di luar dirinya tidak bisa dimengerti tanpa memahami konteks sosial yang lebih luas dimana aktor yang bersangkutan berada<sup>39</sup>.

Identifikasi biasanya spesifik pada isu dan jarang bersifat menyeluruh (meskipun mungkin mendekati cinta dan patriotisme), tetapi selalu melibatkan perluasan terhadap batasan-batasan yang ada pada *Self* untuk memasukkan *Other*. Proses ini memanfaatkan Identitas Peran dan Identitas Jenis tetapi juga melampaui kedua identitas tersebut. Maksudnya Identitas Kolektif dibangun di atas identitas peran terutama pada mekanisme penggabungan *Other* ke dalam *Self* atau dalam bentuk yang secara sosial disebut "Aku (*Me*).". Namun, bedanya identitas peran melakukannya agar *Self* dan *Other* dapat memainkan peran yang berbeda, sedangkan identitas kolektif melakukannya untuk menggabungkan mereka (*self-Other*) ke dalam satu identitas<sup>40</sup>.

Menurut Hunt dan Benford (dalam Snow, Soule & Kriesi, 2004) bahwa identitas kolektif dan konsep-konsep lainnya yang berhubungan seperti solidaritas

---

<sup>39</sup> Ellemers, Naomi, Russell Spears, and Bertjan Doosje. 2002. "Self and Social Identity," Annual Review of Psychology, Vol. 53, pp. 161-186.

<sup>40</sup> Lancaster, Sandra and Foddy, M. (1988) "Self-extensions: A conceptualization," Journal for the Theory of Social Behaviour, 18.

(*solidarity*) dan komitmen (*commitment*) merupakan suatu kemajuan yang sangat menarik dalam memahami gerakan sosial. Konsep identitas kolektif, solidaritas dan komitmen dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat psikologis (*psychological*), psikologi sosial (*social-psychology*) dan sosiologi makro (*macro sociology*) tentang gerakan sosial. Secara umum, identitas kolektif menjelaskan bahwa kelompok memiliki kepentingan (*interest*), nilai (*values*), perasaan (*feelings*) dan tujuan (*goals*) bersama. Lebih lanjut, identitas kolektif menekankan pada komitmen individu dan pada solidaritas dari kolektivitas serta struktur makrososial dan dinamika yang melampaui kolektivitas termasuk membantu membentuk dan memberikan kepentingan, konteks politik, simbol kultur, tujuan dan sebagainya<sup>41</sup>.

Identitas kolektif pada awalnya adalah kelompok pelopor konservasi. Kepentingan, nilai, perasaan dan tujuan untuk melakukan konservasi, selanjutnya, disosialisasikan kepada anggota masyarakat, mulai dari keluarga dan saudara<sup>42</sup>.

Selain itu, Identitas Kolektif juga dibangun di atas identitas jenis karena identitas kolektif melibatkan karakteristik bersama, tetapi tidak semua identitas jenis bersifat kolektif karena tidak semua melibatkan identifikasi. Identitas kolektif, singkatnya, adalah kombinasi yang jelas antara Identitas peran dan identitas jenis, yang memiliki kekuatan kausal untuk membujuk para aktor untuk mendefinisikan Other sebagai bagian dari Self.

---

<sup>41</sup> Sukmana, O. 2016. Konsep dan teori gerakan sosial. Malang. Intrans Publishing.

<sup>42</sup> Diani, M. & Bison, I. 2004. Organizations, coalitions, and movements. *Theory and Society* 33: 281–309.



Maka dari itu negara Arab Saudi melihat bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin ini dapat mempengaruhi tatanan sosial yang sudah ada di Arab Saudi yang pada dasarnya tatan sosial yang damai. Dengan itu Arab Saudi melakukan tindakan sekuritisasi terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin sebelum gerakan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap sosial masyarakat Arab Saudi.

### **1.7.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis termasuk ke dalam tipe penelitian eksplanatif. Menurut Silalahi, penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Hubungan antar variabel pada penelitian eksplanatif hendaknya memiliki hubungan kausal atau sebab akibat<sup>43</sup>. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menerangkan, menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Tipe penelitian ini pada umumnya bertitik pada pertanyaan dasar “mengapa” untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa tertentu. Oleh karena itu, penelitian eksplanatif juga disebut sebagai penelitian konfirmatori (*confirmatory research*).

Pada penelitian eksplanatif, tidak diperlukan kesimpulan akhir yang meyakinkan (*conclusive*), sebaliknya, peneliti diperbolehkan untuk meng-eksplor penelitian dengan kedalaman yang berbeda-beda<sup>44</sup>. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kekuatan statistik, namun membuat peneliti memutuskan bagaimana dan mengapa suatu hal terjadi.

---

<sup>43</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, 2006.

<sup>44</sup> Muhammad Yousaf, *Explanatory Research Definition, Types, Comparison, Advantage, Disadvantages*, Scholarship Fellow.

### **1.7.3 Jangkauan penelitian**

Jangkauan ruang dalam penelitian ini adalah Kelompok gerakan Ikhwanul Muslimin dan Negara Arab Saudi. Adapun jangkauan waktu penelitian adalah awal mula semakin kuatnya gerakan Ikwanul Muslimin di Timur Tengah yang membuat Arab Saudi merasa takut akan gerakan ini yaitu pada tahun 2013 dan batas waktunya adalah bulan maret 2019 yaitu vonis hukuman mati tokoh Ikhwanul Muslimin sebagai bukti konkrit Arab Saudi terhadap Ikhwanul Muslimin. Namun tidak menutup kemungkinan mengambil jangkauan penelitian diluar yang telah ditentukan guna mendapatkan data-data pendukung.

### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi berdasarkan fakta yang terjadi dalam memperkuat penelitian. Berdasarkan sumbernya, data digolongkan menjadi data primer dan data sekunder<sup>45</sup>. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber (biasanya adalah responden ataupun partisipan) melalui wawancara maupun observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder berasal dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelumnya melalui artikel, buku, jurnal ilmiah, laporan, dan publikasi pemerintah<sup>46</sup>.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan studi pustaka, dengan mengumpulkan data-data

---

<sup>45</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, hal.137

<sup>46</sup> *Ibid*, 137

sekunder dari berbagai bahan buku, jurnal, publikasi resmi, artikel-artikel online, dan bahan-bahan lainnya. Dalam pencarian dan pengumpulan data penelitian ini juga berdasarkan pada sumber-sumber yang akurat seperti situs resmi pemerintahan, situs resmi badan resmi tertentu yang berkaitan, informasi resmi, dan lain-lain.

### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Agar suatu penelitian berjalan dengan benar maka diperlukan satu metodologi. Yang dimaksud dengan Metodologi adalah prosedur yang dipakai dalam mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena yang diteliti<sup>47</sup>.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan temuan temuan dan fakta yang ada dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif merupakan aktivitas menempatkan pengamat dengan realitas. Hal tersebut terdiri dari serangkaian representasi, termasuk catatan lapangan, wawancara, konservasi, foto, rekaman, dan memo. Pada tingkat ini, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif naturalistik terhadap dunia. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif mempelajari realitas, dengan mencoba untuk memahami, atau menafsirkan fenomena yang ada<sup>48</sup>.

Metode Penelitian Kualitatif dimulai dengan asumsi, pandangan maupun kemungkinan teori yang digunakan dan pembahasan tentang permasalahan dalam riset penelitian diubah dari makna yang dianggap permasalahan individu atau

---

<sup>47</sup> Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990), 2.

<sup>48</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Second Edition (California: Sage Publication, 2007), 36.

kelompok menjadi permasalahan sosial atau manusia secara keseluruhan. Penelitian Kualitatif digunakan untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, sehingga, terbentuk suatu analisis data yang mapan dan terpolakan<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 36

### **1.7.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis menyusun sistematika penulisan menjadi empat BAB.

1. BAB I Bab ini berisi paparan hal-hal yang mendasari penelitian ini dilakukan serta garis besar dari penelitian ini. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran menjadi bagian dari BAB I ini. Selain itu, metodologi, konseptualisasi dan operasionalisasi konsep, dan sistematika penulisan juga tercantum dalam bagian pertama ini.
2. BAB II menjelaskan tentang pembahasan mengenai ancaman transnasional dan juga persepsi ancaman Arab Saudi terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin
3. BAB III menjelaskan tentang identitas kolektif yang membuat Arab Saudi resah akan tatanan sosial dinegaranya dan juga sekuritisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Ikhwanul Muslimin.
4. BAB IV terakhir pada penelitian ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian mulai dari Bab I sampai dengan Bab III.